

MODEL DEEP DIALOGUE/CRITICAL THINKING SEBAGAI WUJUD WAWASAN PERBUATAN DAN KETERLIBATAN KEBANGSAAN YANG KRITIS DAN DEMOKRATIS**M. Januar Ibnu Adham**

Universitas Singaperbangsa, Karawang Indonesia

Email: m.januar.ibnuadham@fkip.unsika.ac.id

Abstract: *The article aims to describe the efforts of teachers and students to practice good citizenship in the learning process, the paradigm process of citizenship demand, civic responsibility, and citizen participation in PPKn learning. The study used a qualitative design with classroom action research methods. The process filling in data at Kemmis and Taggart, namely Plan, Act & Observe, and Reflect, and data analysis techniques using Miles and Hubberman, namely data reduction, data presentation, levers. The result showed that students in applying the deep dialogue/critical thinking model showed students' abilities in the aspects of intelligence, responsibility, honesty, and good citizenship. Through this application students can form representations in the completion of contemporary discussion themes that are able to create, have or show imagination and artistic or intellectual inventiveness (creative writing), and stimulate imagination and inventive power. And the implementation of Deep Dialogue/Critical Thinking in students of SMAN 1 Karawang can build an active group discourse and also find the concept of cooperative learning which stimulates the effectiveness of classroom learning as a form of character education in youth creation with critical and democratic (community participation).*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan mendeskripsikan guru dan peserta didik dalam mempraktikkan karakteristik warga Negara yang baik dalam proses pembelajaran, sebagaimana paradigma pembentukan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation pada pembelajaran PPKn. Penelitian kualitatif metode classroom action research ini, pengumpulan datanya merujuk pada Kemmis dan Taggart yaitu Plan, Act & Observe, dan Reflect serta analisis data menggunakan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dalam menerapkan model deep dialogue/critical thinking menunjukkan kemampuan siswa pada aspek intelligence, responsibility, honesty dan good citizenship. Melalui penerapan tersebut siswa dapat membentuk representasi dalam penyelesaian tema diskusi kekinian. Implementasi Deep Dialogue/Critical Thinking pada siswa di SMAN di Karawang dapat membangun diskursus kelompok yang bersifat aktif serta ditemukan juga konsep cooperative learning yang merangsang keefektifan pembelajaran dalam kelas sebagai wujud pendidikan karakter pada generasi muda dengan (civic participation) yang kritis dan demokratis.*

Keywords: Deep Dialogue, pengetahuan sikap, partisipasi kewarganegaraan demokratis

Copyright (c) 2020 M Januar Ibnu Adham

Received 28 Nopember 2020, Accepted 23 Desember 2020, Published 20 Januari 2021

Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2 (1), 2021 53

PENDAHULUAN

Model *deep dialogue/critical thinking* merupakan model pembelajaran yang lebih mengutamakan kepada dialog dengan perwujudan interaksi komunikasi antar personal, bersifat kritis, terbuka, jujur dan saling mengutamakan keterbukaan sesama teman sejawat yakni antara peserta didik, dan antara pendidik dan beserta didik. Pengaplikasian dari tehnik *deep dialogue* adalah sebuah cara dalam pemelajaran yang menekankan pada aspek berpikir kritis. Pada tehnik *deep dialogue* ini juga menitikberatkan pada operasionalisasi pemahaman kognisi dengan tujuan melatih kemampuan analisa, pertimbangan dalam membuat keputusan siswa. Selain itu, tehnik ini juga melatih kemampuan siswa dalam penalaran dalam sebuah diskusi yang mencerminkan kematangan rasionalitas yang bersifat kritis, bertanggung jawab, dan konstruktif. Elemen-elemen yang disebutkan pada kalimat sebelumnya ini merupakan hal yang saling bertemali dalam lingkup proses pemelajaran PPKn.¹ Secara prinsip, ihwal pemelajaran PPKn mempunyai spiritualitas yang tidak terbandung terkait bagaimana membentuk dan mewujudkan warganegara yang cerdas dan baik. Setakat dengan hal tersebut, mata pelajaran PPKn dengan berlandaskan proyek lebih menitikberatkan terkait bagaimana membentuk warganegara yang berintelektualitas, bertanggungjawab, dan partipasi.² Ketiga kata inilah merupakan wujud penekanan dalam sebuah proses pemelajaran oleh guru. Selanjutnya, peneliti mencoba-padukan kondisi kelas agar dapat mendekati kondisi ideal atas kognisi kognitif dalam hal mengkreasi oleh peserta didik. Tema pengimplementasian dikusi yang dinamis mengenai HAM dapat dilekatkan pada pengorganisasian kelas berbasis Lembar kerja siswa.

Fokus dari penelitian ini terletak pada ketiga faktor tersebut. Peneliti mencoba mencantumkan penelitian yang relevan seperti dari Bron (2014) menginvestigasi keterlibatan para peserta didik ketika berdiskusi dalam menentukan isi yang saling bertemali sebagai bahan untuk dipelajari secara kolaborasi sebagai sebuah varian atmosfer dalam belajar. Hasil penelitian dari Bron adalah "...ini memungkian para peserta didik untuk mengancangbangun atas penengetahuan yang belum kuat untuk kembali mengkreasi melalui sederet pertanyaan yang mereflesikan sebuah keunikan dari lensa berpikir para peserta didik tersebut.

¹ Baca, Nastiti Mufidah, "Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 259–69.

Fundamental dari pendidikan abad 21 dari cara berpikir Born adalah terletak pada diskusi kritis, praktis, dan nyata. Proses perhelatan antara konten dengan tema diskusi adalah sebuah metamorfosa dari pentingnya pengalaman proses belajar yang memberikan pijakan kuat bagi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kewarganegaraan dan pengetahuan kewarganegaraan.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mandasari & Nadjamuddin (2015) mempercayai bahwa gaya belajar dari masing-masing peserta didik akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengkreasi sebuah objek. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandasari & Najmuddin tersebut mendorong penelitian sebelumnya dari Kisti & Fardana (2012) yang meyakini bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan diri seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang tersebut dalam membentuk atau mengkreasi objek. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya di paragraf ini, hal ini menunjukkan bahwa peran pendidik memiliki peran vital dalam memfasilitasi pengembangan kemampuan dari peserta didik.

Data temuan pembelajaran kreasi dari (Bron, 2014) secara kontras memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kenedi (2017) di Indonesia. Kenedi (2017) menemukan bahwa pendekatan *inquiry*, *brain storming*, pemberian penghargaan, pemberian stimulus berada pada posisi absen. Ketidakhadiran ini terjadi akibat cakupan berpikir dan berlaku kreatif tidak ada. Kekurangan interaksi antara pendidik dan peserta didik ini terjadi pada saat proses pembelajaran.

Dalam situasi pendidikan tersebut, pembelajaran dengan berpijak pada proyek merupakan salahsatu solusi alternatif yang digunakan untuk bagi peserta didik untuk menjadi pengalaman dalam mengkreasi objek. Konsep PBL dari Sucipto (2017), Sayekti (2016), Wijayanti (2016) dan Sari (2015) masih melingkupi pada tataran peningkatan minat belajar, keaktifan, peningkatan prestasi belajar PKn dan hasil belajar IPS. Penelitian-penelitian tersebut bermuara pada penelitian sosial yang terbagi ke dalam penelitian sosial sebagai pemikiran sosial sebagai ilmu sosial dan penelitian sosial sebeagai sebua refleksi penelitian.³

² Mukhibat Mukhibat and Mukhlison Effendi, "Strengthening of National Identity Through Personality Development Based on EthnoPedagogy at Higher Education," *Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (2020).

³ Supardan, Dadang, *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial: Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 10.

Penelitian-penelitian tersebut sepertinya melewatkan apa yang disebut dengan studi atau penelitian pemikiran social sebagai proses transmisi kewarganegaraan. Contoh dari mata pelajaran PPKn merupakan studi atau penelitian bidang pemikiran sosial sebagai proses transmisi kewarganegaraan. Secara luas, Winataputra meyakini bahwa PPKn mempunyai paradigma dari sudut pandang psiko-pedagogis dan psiko-andragogis yang bermuara kepada sifat-sifat warga Negara yang baik.⁴

Oleh karena itu, peneliti dalam artikel ini memfokuskan aspek studi pemikiran sosial sebagai transmisi kewarganegaraan seperti apa yang dilakukan oleh (Supardan, 2015) yang menekankan pembelajaran terhadap generasi muda yang sehat, berpengetahuan, berkebudayaan, dan mewadahi apa yang dinamakan dengan warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan.⁵ Lalu apa yang dimaksud dengan kompetensi kewarganegaraan tersebut? Winataputra memaparkan bahawa "kompetensi kewarganegaraan" memiliki intelektualitas, tanggungjawab, dan partisipasi kewarganegaraan. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti berada dalam posisi untuk mengisi rumpang penelitian yang belum terekplorasi secara baik yaitu pada peran keterlibatan atau partisipasi warga negara yang bijak dan baik melalui sederet aktifitas mengkreasi terkait isu diskusi yang berusaha mencari sebuah jawaban atau solusi terkait isu mengenai hak asasi manusia sebagai bagian yang ikut andil dalam masyarakat yang demokratis.⁶

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan penelitian tindakan kelas (PTK). Peneliti memilih peserta didik di SMA Negeri 1 Karawang dengan kelas yang berasal dari XI IPA 1-5, IPS1-3 dan Bahasa sebagai subjek penelitian. Ide pemajuan HAM merupakan ide dari para pemikiran subjek tersebut. Kemmis & Taggart memiliki sebuah pola perencanaan, Tindakan, & observasi yang diikuti oleh peneliti untuk mengolah data dalam penelitian ini. Agar kredibilitas secara kualitas bermutu, peneliti juga menerapkan triangulasi dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini. Selain itu, peneliti juga menerapkan analisis kasus negatif dan *member check*. Kedua strategi terakhir yaitu analisis negatif dan *member check*

⁴ Winataputra, U. S. & Sapriya, "Paradigm Baru PKn di SD/MI". (Universitas Terbuka Press: Jakarta, 2011), 1-2.

⁵ Supardan, Dadang, *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial: Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 10.

terakhir dilakukan untuk mengkonfirmasi terkait kebenaran data yang diperoleh terhadap para partisipan yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Terakhir, peneliti menganalisis data berdasarkan gaya analisis Miles dan Huberman (2014), yang melakukan analisis secara berkelanjutan dan berulang terutama pada perencanaan, Tindakan, observasi, & refleksi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan kriteria data warganegara dari dokumentasi yang diperoleh dari hasil lembar observasi deskripsi. Data tersebut diambil dari para peserta didik di SMAN 1 Karawang. Data deskriptif tersebut memuat informasi sifat warga negara yang berintelektualitas, bertanggungjawab, & partisipasi dan mereka mampu untuk berkreasi dan berkreatifitas dalam mengejawantahkan objek. Jika mengacu terhadap kamus *Webster* seperti yang disitasi oleh Paul & Elder (2008:3) menempatkan urutan sosial dalam kaitan berpikir kritis dan berpikir kreatif dari peserta didik dalam menilai⁶.

Selanjutnya, model pembelajaran *deep dialogue/critical thinking* membutuhkan beberapa faktor pendukung belajar seperti pengetahuan peserta didik, kepercayaan diri yang dimiliki siswa dalam merepresentasikan ide, gagasan dan keterampilan yang berimplikasi terhadap diskusi elegan, beretika, dan dinamis. Analisis pada level mumpuni pada siswa akan memengaruhi paradigma dalam proses pembelajaran PPPKn. Wujud nyata ranah dari hasil kerja peserta didik dalam menyalurkan ide atau gagasan haruslah bermakna. Nilai bermakna tersebut secara semiotika mempunyai apa yang disebut dengan 1) mampu berkreasi, 2) memiliki jiwa yang dapat berimajinasi dan seni, dan 3) menstimulasi imajinasi dan tekad yang tidak lembek.⁶ Tujuan pembelajaran dalam strata belajar sosial meliputi kemampuan untuk menginterpretasi dengan cara berpikir rasional, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mensintesis suatu hal yang berkaitan dengan belajar. Ada beberapa yang harus diperhatikan sebab satusama lain berkaitan seperti kemampuan dan mendeskripsi serta memproduksi sesuatu yang baru dari diri peserta didik. Langkah terakhir adalah peneliti

⁶ Winataputra, U. S. & Sapriya, "Paradigm Baru PKn di SD/MP". (Universitas Terbuka Press: Jakarta, 2011).

⁷ Miles dan Huberman (2014)

mencobajelaskan makna gambar dan tema dalam sebuah diskusi apakah mempunyai dampak terhadap para pembaca atau tidak.

Model *deep dialogue/critical thinking* yang menunjukkan kemampuan siswa pada aspek *intelligence, responsibility, honesty* dan *good citizenship* dan dapat membangun suatu diskursus kelompok yang bersifat aktif serta ditemukan juga konsep *cooperative learning* yang merangsang keefektifan pembelajaran dalam kelas sebagai wujud pendidikan karakter pada generasi muda dengan (*civic participation*) yang kritis dan demokratis.

Tema Pertama: Menolak LGBT sebagai diskursus Ketegasan HAM di Indonesia

Berita dan isu penolakan LGBT dianalisa dan di-diseminasi oleh salah satu kelompok di kelas XI IPA 1, kelompok di kelas XI IPA2 dan XI IPA 4. Identitas Kelompok Latifah (16 tahun), Sofi (16 tahun), Esy (16 tahun) dan Imelda (16 tahun) memaparkan bahwa “Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Apa lagi dengan mengubah takdir yang ditetapkannya. Bahagia itu sederhana, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesetaraan bukan dengan sejenis, berbeda itu lebih indah. Maka, jagalah dirimu sebaik mungkin, karena itu adalah amanah. Apapun itu, siapapun itu, ingat! Semua akan dipertanggungjawabkan pada waktunya. Jadilah generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa dan agama, dengan jauhi LBGT!”

Penjelasan seperti yang diutarakan pada paragraf sebelumnya merupakan representasi berpikir kritis dari sampel pratisipan dikelas XI IPA 1 terkait legalisasi LGBT. Secara singkat survai yang dilakukan oleh *National Geographics* menemukan bahwa sumber kegelisahan dan ketakutan masyarakat Indonesia waktu penelitian ini dilakukan adalah merebaknya isu legalisasi LGBT.

Tema serupa juga dibuat oleh kelompok Andri (15 tahun), Arkania (16 tahun), Fadia (16 tahun), Geesha (16 tahun) Mia (16 tahun), Irhas (16 tahun) kelas XI IPA 1. Kelompok ini mendiseminasi dengan menyatakan bahwa, “LGBT atau singkatan dari *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Trans-gender* adalah penyakit mental yang tengah marak di perbincangkan akhir-akhir ini. LGBT juga merupakan suatu penyakit yang bisa saja menular oleh karena itu LGBT harus disembuhkan dengan melalui hal-hal positif. Dimulai dari kasih sayang dari keluarga, terutama pesan orang tua yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya. Hal positif kedua yaitu agama atau menambah keimanan diri dengan selalu dekat dengan Tuhan. Selanjutnya hal positif lainnya yaitu pendidikan, rasa cinta dan juga kasih sayang antar

lawan jenis dan hal-hal positif lainnya seperti bergaul yang sehat, melakukan kegiatan sosial. Ayo kita lakukan hal positif agar negeri tercinta kita tidak marak lagi akan LGBT yang semakin luas. Sembuhkan LGBT dengan hal positif. Tolak LGBT untuk negeri kita tercinta.”

Pernyataan tentang LGBT pada paragraf sebelumnya merupakan akumulasi dari pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena sosial. Pernyataan tersebut merepresentasikan komitmen sebagai warga Negara untuk menjaga kondisi ideal Negara nya. Secara idealis, peneliti menganggap bahwa peserta didik memiliki kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara prinsip dibatasi oleh Hak Asasi orang lain dari sudut pandang Indonesia. Kelompok Latifah (16 tahun), Sofi (16 tahun), Esy (16 tahun) dan Imelda (16 tahun) berharap dengan diseminasi tema diskusi tersebut, agar masyarakat menjauhi LGBT terutama untuk generasi muda.

Tema Kedua: Anti Korupsi sebagai Diskursus Ketegasan HAM di Indonesia

Kelompok 3 kelas XI IPS 2 memiliki perhatian terhadap ancaman koruptor terhadap kesejahteraan negara, namun mereka memaparkan kepeduliannya dengan sebuah poster yang memiliki komponen gambar komprehensif, dengan latar koruptor, teorisme, ancaman militer, dan isu radikalisme. Kelompok 3 XI IPS 2 beranggotakan Ayu Nur Baiti (16 tahun); Saniyah Supwatunida (16 tahun); Stevia Zahra R.K (15 tahun); Farhan Choirul Rosadi (16 tahun); Sasa Sedarudin. M (16 tahun). Poster tersebut dapat diakses pada laman https://www.instagram.com/p/Bg8xL8nnfIQ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1p3tbw7t6jyz. Kelompok tersebut mendeskripsikan bahwa, “banyaknya koruptor yang merajalela sangat meresahkan banyak orang. Dengan adanya analisa ini kami berharap agar tidak adanya lagi koruptor.” Pernyataan tersebut kurang memiliki *hight speech* yang kuat. Namun dapat dinilai secara subjektif bahwa kelompok Abiyyu (16 tahun) memiliki perhatian terhadap isu korupsi di Indonesia, dan menyatakan menolak tindak korupsi. Gagasan dengan tema serupa juga dibuat oleh salah satu kelompok kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4. Jargon stop korupsi menjadi perhatian beberapa kelompok, termasuk kelompok 7 XI IPA 2 yang beranggotakan Ayunda (16 tahun); Charisse (17 tahun); Dita (16 tahun); Nazwa (16 tahun); Nurul (16 tahun) dan Sophie (16 tahun). Kelompok 7 menarasikan, “ini bukan tentang siapa yang paling terkenal, bukan tentang kepemimpinan atau apa jabatan dan kastanya, bukan tentang keberanian dan ketakutan. Ini tentang kejujuran dan kebohongan. Bangsa Indonesia memang tidak

kekurangan orang yang pintar apalagi berani, tetapi bangsa Indonesia kekurangan orang yang jujur.”

Dari disseminasi analisa dan jargon stop korupsi sesuai dengan pernyataan diatas ditambahkan oleh kelompok 7 berharap masalah korupsi di Indonesia bisa segera diatasi dan banyak pemuda anti korupsi. Karena, menurut kelompok kami korupsi di zaman sekarang berawal dari hal-hal kecil. Maka dari itu, kami memilih judul “Korupsi”. “Hapus korupsi untuk menemukan jati diri Indonesia”. Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran Akbar Yudha (XI IPS 1, 16 th); Dito Ramdhani R.A (XI IPS 1, 16 th); Fayza Salsabila R (XI IPS 1, 16 th); Nabila Dwi Nurjelita (XI IPS 1, 16 th); Zilki Tsani A (XI IPS 1, 16 th) terkait kasus korupsi di Indonesia. Mereka menyerukan untuk bertindak preventif dalam menanggulangi tindak korupsi.

Tema Ketiga: Kebebasan Mengungkapkan Pendapat VS Hoax dalam HAM

Berita hoax menjadi isu yang cukup menghebohkan massa di Indonesia, khususnya individu yang tidak gagap teknologi. Kebebasan berpendapat memperoleh angin segar setelah jatuhnya rezim orde baru, namun di era industry 4.0 kebebasan berpendapat telah bertransformasi menjadi isu-isu propaganda. Hal ini menjadi perhatian beberapa kelompok di kelas XI IPS 1 dan XI IPA 2. Berita hoax menjadi tema yang menarik perhatian kelompok 6 kelas XI IPS 1. Kelompok ini beranggotakan Adhisti A (XI IPS 1,17 th); Dira Devayanti (XI IPS 1, 16 th); Heny Setiowati (XI IPS 1, 16 th); Nazwa Alifa N (XI IPS 1, 15 th); dan Roy Octavian P (XI IPS 1, 16 th). Mereka membuat narasi sebagai berikut:

“Realita jaman sekarang adalah orang-orang mudah sekali termakan berita hoax. Seharusnya, masyarakat lebih bijak memilih berita mana yang dapat dikonsumsi dan tidak bisa. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk menghindari berita hoax. Harapan kami adalah semoga masyarakat bisa bercermin bahwa tidak semua yang diberitakan di internet adalah hal yang benar atau sesuai dengan fakta”.

Pernyataan tersebut merepresentasikan sikap kelompok 6 terkait berita bohong. Terkait dengan berita hoax atau berita bohong merupakan isu vital dalam kaitannya dengan hak asasi manusia perlu dibenarkan sesuai dengan garis lurus nya. Isi dari berita bohong atau hoax merupakan cerminan jiwa yang miskin dari tanggungjawab sebagai salahsatu bentuk refleksi seorang warga negara dalam menuangkan ide atau pikirannya. Tema diskusi dengan tema sama juga di presentasikan oleh kelompok 7 kelas XI IPS 1, dalam diskusi tersebut menunjukkan perubahan teknologi menjadi hal perlu disikapi dengan hati-hati disamping nilai

positifnya. Diskusi tersebut menunjukkan sikap peserta didik terhadap berita hoax yang perlu adanya pemilahan dan penggalian informasi secara mendalam. Berikut argumentasi kelompok 7 terkait hal ini, “Pergunakanlah teknologi dengan sebaik mungkin jangan sampai disalahgunakan. Kenapa kami memilih tema ini menurut kami dijamin sekarang ini teknologi banyak digunakan tentang hal yang tidak seharusnya dilakukan contohnya seperti menyebarkan “Berita Hoax”, itu bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan seharusnya kita lebih dewasa dalam menggunakan teknologi terutama teknologi informatika.” Pada argument tersebut, menunjukkan kepedulian peserta didik terhadap isu yang perlu di uji kebenarannya. Kelompok 7 memberi saran kepada masyarakat luas terkait sikap kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Diskusi dengan tema yang sama di publikasi oleh kelas kelompok 2 kelas XI IPS 2. Kelompok tersebut beranggotakan Hana Azizah Fitri (16 tahun); Fitria Rahma Desti (15 tahun); Rani Citra H (16 tahun); Refiana Bunga Warsono A (16 tahun), mereka menarasikannya sebagai berikut. “Hoax adalah informasi palsu yang sudah tidak asing lagi”. Karena Indonesia juga termasuk negara yang masyarakatnya mudah terpengaruhi oleh berita palsu. Penyebaran hoax ini sangat mudah sekali tersebar bahkan sebelum adanya internet, namun sekarang dengan adanya internet, hoax jauh lebih membahayakan. Mari kita berantas hoax di Indonesia dan di dunia!” Pernyataan tersebut merupakan seruan atau ajakan kepada khalayak umum terkait isu hoax yang perlu disikapi dengan bijak. Tema dengan pembedaan yang berisi pengajakan agar menyingkirkan hoax dengan tujuan keutuhan NKRI tetap berdiri tegak dapat dibaca pada paragraf ini dan ini menunjukkan bahwa siswa mampu menjadi warganegara yang mampu berpikir kritis, bertanggungjawab, dan mampu berpartisipasi dalam hal belajar sosial secara positif dengan menggunakan logika mereka sebagai peserta didik.

Selanjutnya terkait model pembelajaran *deep dialogue/critical thinking* mengejawantahkan intelektualitas, tanggungjawab, dan keterlibatan atau partisipasi dari peserta didik. Mereka merupakan bagian dari apa yang disebut masyarakat demokrasi di Indonesia. Cara menentukan sebuah isu sentral dibutuhkan kemampuan dalam berpikir kritis dan terealisasi dalam sikap dan perbuatan. Kepaduan tersebut dapat tercipta apabila peserta didik mempunyai tekad yang kuat untuk menalar secara kritis dan kreatif untuk menunjukkan

sebuah nilai diri yang berimplikasi pada sikap dari pesertadidik⁸. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik direpresentasikan oleh hasil tugas peserta didik berupa gagasan-gagasan dari dialog atau diskusi mendalam dan konstruktif. Ide konstruksi sosial ini setakat dengan apa yang dipikirkan oleh Berger & Luckmann (2016). Secara lebih luas, Suprijono & Pasya (2013: 187) menjelaskan-hubungkan bahwa rasionalisasi dari konstruksi sosial tersebut telah menggambarkan bahwa realitas sosial merupakan sebuah pengetahuan. Dalam konteks ini, pengetahuan tersebut bersifat subjektif perindividu dalam wadah masyarakat. Lebih lanjut, Suprijono dan Pasya (Ibid) mempercayai manusia merupakan makhluk kreatif yang berkemampuan untuk merealisasikan makna baik secara perorangan atau secara kolektif sosial. Sehingga, manusia dalam memilih memiliki kewenangan sepenuhnya untuk bebas memilih dan merangkai makna yang dimaksudkan. Sehingga, wacana tersebut merupakan cermin kenyataan sosial yang dikonstruksi secara sengaja dari para peserta didik di tiap-tiap kelompok tersebut.⁹

Berdasarkan dari pemikiran Suprijono & Pasya (2013) tersebut menguraikan realitas konstruksi masyarakat Osing mengenai cara berpikir dan cara menopang kehidupan mereka sendiri. Sebagai tambahan, masyarakat Osing tersebut menekankan keserasian dalam hubungan sosial dan prinsip teguh dalam bernalar yang dilakukan secara sadar dengan tetap bersandarkan pada nilai tatanan demokrasi. Pendapat ini setakat dengan apa yang dikemukakan oleh NCSS “...*Teachers show interest in and respect for students’ thinking and demand well-reasoned arguments rather than opinions voiced without adequate thought or commitment...*”.¹⁰ Rasa hormat dan ketertaikan oleh pendidik terhadap cara berpikir peserta didik merupakan salahsatu upaya yang terhormat dalam memanusiakan manusia.

Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini, peneliti akhirnya melihat bahwa ilmu pengetahuan akan senantiasa berkembang akibat terusnya *sillaturahmi* antar pengetahuan yang terjadi secara berkelanjutan dan melahirkan ilmu pengetahuan yang baru. Indera yang dimiliki manusia akan menjadi titik awal dalam mempersepsi pengetahuan.⁹ Upaya elaborasi dan kolaborasi antar peserta didik dalam berdiskusi merupakan cara yang bagus untuk melatih kepekaan dalam mempelajari isu realitas sosial. Dua ide utama dalam penelitian ini ialah

⁸ Paul, R. & Elder, L. “The thinkers guide to the nature and functions of critical & creative thinking. Foundation for critical thinking press”,(2008), 4.

⁹ Suprijono, A. & Pasya, G. K. “Konstruksi Sosial Remaja Osing Terhadap Ritus Buyut Cili Sebagai Civic Culture untuk Pembentukan Jatidiri”. (Jurnal penelitian pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, Vol 13, No. 2), 187).

konstruktivisme yakni proses pembelajaran secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, interaksi dalam konteks sosial merupakan ide vital dalam membangun sebuah pengetahuan sosial⁹. Oleh karena itu, agar ilmu pengetahuan dan logika menjadi dinamis dan berkembang pada ranah deduktif-induktif-hipotesis-verifikasi maka pemilihan isu sentral dalam sebuah diskusi diperlukan.

PENUTUP

Pembelajaran PPKn beraksesntuasi ada aspek pembentukan *civic intelligence*, *civic skill* dan *civic participations*. Pembelajaran di sekolah cenderung memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang mampu memahami konsep secara teoretis. Hal ini berimplikasi pada adanya disparitas antara kurikulum *in document* dan kurikulum *in action*. Untuk menentukan sifat dari warga negara yang berkriteria baik bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Karawang adalah peneliti menggambarkan bahwa warganegara yang baik harus mempunyai apa yang dinamakan intelektualitas, tanggungjawab, dan keterlibatan atau partisipasi. Berpikir kritis dan kreatif merupakan hasil daya berpikir. Pembentukan strata sosial dalam proses pembelajaran PPKn dengan model *deep dialogue/critical thinking* diperlukan memiliki kemampuan mengakuisisi ilmu secara luas. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peserta didik dalam menilai fakta, data, konsep bahkan generalisasi. Ketertarikan dan tidak meremehkan terhadap gagasan peserta didik oleh pendidik merupakan obat mujarab dalam menginiasi peserta didik agar memiliki kecerdasan sosial secara baik. Dengan cara demikian maka peserta didik dapat merepresentasikan tema yang bersifat kekinian. Para peserta didik dapat mengkreasi, memiliki sebuah imajinasi dan kesenian yang bersifat membangun, dan menstimulasi imajinasi serta kekuatan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bron, J.G. "What Student Want? Involving Students in Negotiating the Social Studies Classroom Curriculum". *Journal of International Social Studies*, Vol. 4, No. 1, 2014, 3-16
- Kenedi.. "Pengembangan Kreativitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran di Kelas II Smp Negeri 3 Rokan IV Koto". *Suara Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora* vol. 3 no. 2, Juni 2017

¹⁰ NCSS, National Standards for Social Studies Teachers, (Volume 1, 2002).

- Kisti, H.H & Fardana, N.A. "Hubungan Antara Self Efficacy dengan Kreativitas pada Siswa SMK". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1 No. 02, Juni 2012
- Mandasari, Y. & Nadjamuddin, R. "Pengaruh Gaya Belajar Siswa Terhadap Kreativitas Siswa Pada Mata Pelajaran Seni Budaya Dan Keterampilan (SBK) Materi Seni Rupa Menggambar Kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Karang Binangun Belitang Oku Timur". Volume 1 (Januari 2015).
- Mufidah, Nastiti. "Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 259–69.
- Mukhibat, Mukhibat, and Mukhlison Effendi. "Strengthening of National Identity Through Personality Development Based on EthnoPedagogy at Higher Education." *Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (2020).
- NCSS. National Standards for Social Studies Teachers. Volume 1, 2002
- Paul, R. & Elder, L.. *The Thinkers Guide To The Nature And Functions Of Critical & Creative Thinking*. Foundation for critical thinking press, 2008.
- Sucipto, H. "Penerapan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar IPS". *Jurnal Pendidikan: Riset & Konseptual*. Vol. 1 No. 1. (Oktober 2017).
- Suprijono, A. & Pasya, G. K. "Konstruksi Sosial Remaja Osing Terhadap Ritus Buyut Cili Sebagai Civic Culture un-tuk Pembentukan Jatidiri". *Jurnal penelitian pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol 13, No. 2, (2012).
- Supardan, Dadang. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial: Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sari, e.m. "Pengaruh model Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Kelas V". Universitas Tanjungpura Pontianak. Skripsi, 2015 (tidak diterbitkan)
- Sayekti, A. "Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Pokok Bahasan Masa Colonial Eropa Di Indonesia Terhadap Keaktifan Belajar IPS Kelas VII SMP N 2 Juwana tahun Pelajaran 2015/2016". Universitas Negeri Semarang. Skripsi Tahun 2016 (tidak diterbitkan)
- Wijayanti, R. "Peningkatan Prestasi Belajar Pkn Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Digal Wonogiri. Universitas Negeri Yogyakarta". Skripsi Tahun 2016 (tidak diterbitkan)
- Winataputra, U. S. & Sapriya. *Paradigm Baru Pkn di SD/MI*. Jakarta: Universitas Terbuka Press, 2011.